



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN  
KUNJUNGAN KERJA KOMISI IV DPR RI  
RESES MASA PERSIDANGAN II TAHUN SIDANG 2023-2024  
KE PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

\*

\*\*

\*\*\*

\*\*

\*

**JAKARTA 2023**



**LAPORAN**  
**KUNJUNGAN KERJA KOMISI IV DPR RI**  
**RESES MASA PERSIDANGAN II TAHUN SIDANG 2023-2024**  
**KE PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**  
**12-16 DESEMBER 2023**

**I. PENDAHULUAN**

**A. DASAR KUNJUNGAN KERJA**

Dasar hukum yang dipergunakan dalam melaksanakan Kunjungan Kerja Reses Komisi IV DPR RI Masa Persidangan II Tahun Sidang 2023-2024 ke Provinsi Kalimantan Timur adalah:

1. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang tentang Tata Tertib:
  - a. Pasal 59 ayat (4) butir d: Tugas komisi dalam bidang pengawasan adalah melakukan pengawasan terhadap kebijakan Pemerintah.
  - b. Pasal 59 ayat (5) butir f: Komisi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) dapat mengadakan kunjungan kerja.
2. Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Badan Musyawarah DPR RI tanggal 27 September 2023.
3. Keputusan Rapat Intern Komisi IV DPR RI tanggal 2 November 2023.

**B. RUANG LINGKUP**

Ruang Lingkup Kunjungan Kunjungan Kerja Reses Komisi IV DPR RI Masa Persidangan II Tahun Sidang 2023-2024 ke Provinsi Kalimantan Timur adalah melakukan fungsi pengawasan dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi pokok DPR RI.

## **C. TUJUAN**

Maksud dan tujuan dari Kunjungan Kerja Reses Komisi IV DPR RI Masa Persidangan II Tahun Sidang 2023-2024 ke Provinsi Kalimantan Timur adalah untuk melakukan:

1. Diskusi mengenai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut di Kalimantan Timur serta Penyediaan Ikan dan Produk Perikanan Berkualitas ke Wilayah Ibu Kota Nusantara;
2. Diskusi mengenai Kesiapan Pangan Jelang Hari Natal 2023 dan Tahun Baru 2024; serta
3. Kunjungan ke Persemaian Mentawir serta Diskusi mengenai Kegiatan Penyiapan Bibit Tanaman Hutan serta Pemulihan Ekosistem dan Rehabilitasi Hutan dan Lahan di Wilayah Ibu Kota Nusantara dan sekitarnya.

## **II. SUSUNAN TIM**

Kunjungan Kerja Reses Komisi IV DPR RI Masa Persidangan II Tahun Sidang 2023-2024 ke Provinsi Kalimantan Timur dipimpin oleh Bapak Firman Soebagyo, S.E., M.H. dan diikuti oleh Para Anggota Komisi IV DPR RI.

## **III. PELAKSANAAN**

### **A. PELAKSANAAN DAN LOKASI KUNJUNGAN**

Kunjungan Kerja Reses Komisi IV DPR RI Masa Persidangan II Tahun Sidang 2023-2024 ke Provinsi Kalimantan Timur dilaksanakan pada tanggal 12-16 Desember 2023. Kunjungan Kerja dilaksanakan di:

1. Kantor BPSPL Pontianak Satuan Kerja Balikpapan, di Sepinggian, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan;
2. Kantor Perum BULOG Divre Klandasan Ilir, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan;
3. Lokasi Pembangunan Ibu Kota Nusantara di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara; serta
4. Persemaian Mentawir di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara.

## **B. GAMBARAN UMUM**

### **1. Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut di Kalimantan Timur serta Penyediaan Ikan dan Produk Perikanan Berkualitas ke Wilayah Ibu Kota Nusantara**

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia, memiliki 17.480 pulau-pulau besar dan kecil serta garis pantai sepanjang 95.181 km. Dengan Luas daratan hanya 1,9 juta km<sup>2</sup>, maka 75% wilayah Indonesia berupa lautan, yang terdiri dari 3,1 juta km<sup>2</sup> wilayah laut teritorial dan 2,7 juta km<sup>2</sup> zona ekonomi eksklusif (ZEE). Dengan realitas seperti ini, Indonesia tentu saja memiliki potensi sumberdaya kelautan, yang terdiri atas sumberdaya alam dapat pulih (*renewable resources*), sumberdaya alam tidak dapat pulih (*non-renewable resources*), sumber energi kelautan, dan jasa-jasa lingkungan yang sangat besar. Sumberdaya kelautan dapat pulih diantaranya ekosistem terumbu karang, padang lamun, hutan mangrove dan berbagai jenis ikan.

Provinsi Kalimantan Timur memiliki luas wilayah daratan 127.267,52 km<sup>2</sup> dan luas pengelolaan laut 25.656 km<sup>2</sup>, terletak antara 113<sup>o</sup> 44' dan 119<sup>o</sup> 00' Bujur Timur, dan antara 2<sup>o</sup> 33' Lintang Utara dan 2<sup>o</sup> 25' Lintang Selatan. Provinsi Kalimantan Timur juga memiliki kawasan pesisir, laut dan pulau-pulau kecil sepanjang 1.859,22 km yang kaya dengan keanekaragaman sumber daya alam dan jasa lingkungan yang berpotensi ekonomi. (BPS Kaltim, 2016). Kekayaan alam tersebut hendaknya dapat dikelola dengan baik untuk menunjang peningkatan kesejahteraan masyarakat, terutama masyarakat pesisir, laut dan pulau-pulau kecil.

Pemberdayaan potensi pesisir secara tepat diharapkan mampu mewujudkan kesejahteraan masyarakat, memberikan manfaat yang besar pada masyarakat, karena banyak potensi ekonomi yang berkembang disekitar pesisir. Pada umumnya sumberdaya pesisir di Kalimantan Timur banyak didominasi oleh sumberdaya alam yang dapat diperbaharui (*renewable resource*) misalnya, hutan mangrove, terumbu karang, padang lamun dan rumput laut, sumberdaya perikanan laut serta bahan-bahan bioaktif.

Selain sumberdaya tersebut masih banyak jasa-jasa lingkungan yang berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat, misalnya pemanfaatan kawasan pesisir dan lautan sebagai lokasi rekreasi dan pariwisata, media transportasi, sumber energi, sarana pendidikan dan penelitian, pertahanan keamanan, penampungan limbah, pengatur iklim, kawasan perlindungan, dan sistem penunjang kehidupan serta fungsi ekologis lainnya.

Tingginya potensi sumberdaya alam lingkungan pesisir Provinsi Kalimantan Timur seringkali menyebabkan pengelolaan sumberdaya alam kawasan pesisir tidak dapat dikelola dengan baik, sehingga tidak memenuhi berbagai aspek pembangunan berkelanjutan. Dampaknya ekosistem pesisir di beberapa wilayah di Kalimantan Timur telah mengalami penurunan keseimbangan ekologis sebagai akibat pengelolaan yang kurang berorientasi pada keberlanjutan pemanfaatan sumber daya laut.

Kerusakan ekosistem terumbu karang, padang lamun dan hutan mangrove telah berdampak pada penurunan daya dukung lingkungan laut dan pesisir, yang tampak pada penurunan hasil tangkapan ikan dan organisme laut serta jasa lingkungan lainnya. Berbagai kerusakan itu muncul akibat aktivitas manusia seperti reklamasi, industri, transportasi, permukiman, pelabuhan, pertanian dan kegiatan lainnya.

Kerusakan Kawasan pesisir, laut dan pulau-pulau kecil sangat dipengaruhi oleh aktifitas daratan, karena hampir semua sungai bermuara di kawasan pesisir dan laut. Beberapa aktifitas yang berpengaruh terhadap ekosistem pesisir, laut dan pulau-pulau kecil seperti, pertambangan, pertanian, perikanan, permukiman, dan industri. Aktivitas ini seringkali mengakibatkan pencemaran air laut.

Berdasarkan sudut pandang pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*), pengelolaan sumberdaya yang terdapat di wilayah pesisir Kalimantan Timur terletak pada kebijakan yang kurang konsisten, dengan indikator masih terdapat beberapa wilayah pesisir yang telah dimanfaatkan sampai terlampauinya daya dukung atau kapasitas berkelanjutan dari ekosistem pesisir.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mencatat secara keseluruhan progres pembangunan infrastruktur fisik di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara per 6 Desember 2023 telah mencapai 60,3%. Adapun infrastruktur yang tengah dibangun di antaranya, jalan tol, bendungan, perkantoran pemerintahan, sumbu kebangsaan, kantor dan istana presiden, serta perumahan menteri.

Selain pembangunan untuk pemerintahan, sudah ada sejumlah investor dalam negeri yang melakukan peletakan batu pertama atau groundbreaking di IKN. Berbagai agenda peletakan batu pertama alias groundbreaking pun akan terlaksana pada Desember 2023 dan Januari 2024.

Pemerintah memastikan akan mengirim 1.800 aparatur sipil negara (ASN) ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara pada Juli 2024, dimana pemindahan itu disesuaikan dengan jumlah ketersediaan rumah susun yang telah dibangun pemerintah.

Setelah gelombang pertama ini, pemerintah akan berangsur mengirimkan ASN, baik PNS dan TNI/Polri, hingga mencapai 16.990 orang. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) sudah memiliki formula untuk menentukan pihak-pihak ASN yang akan dipindahkan sesuai tahapannya. Secara total, ASN yang akan dipindahkan pada 2024-2045 terdapat 100.023 orang berdasarkan perhitungan Bappenas.

Pemindahan ibu kota negara ke IKN Nusantara di Kabupaten Paser Penajam Utara tentunya memiliki konsekuensi ketersediaan bahan pangan bagi ASN serta pelaku bisnis di sekitar IKN, diantaranya ikan dan produk perikanan berkualitas ke wilayah IKN Nusantara.

## **2. Kesiapan Pangan Jelang Hari Natal 2023 dan Tahun Baru 2024**

Indonesia masih dihadapkan pada berbagai tantangan dalam upaya penyelenggaraan pangan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia secara adil, merata, dan berkelanjutan berdasarkan kedaulatan pangan, kemandirian pangan, dan ketahanan pangan sebagaimana amanat UU Nomor 18 Tahun 2012.

Saat ini, Indonesia masih terus berupaya untuk pulih dari dampak Pandemi Covid-19. Hal ini sejalan dengan tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023 yaitu peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Dalam upaya mendorong peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, implementasi sasaran dan arah kebijakan Pembangunan dituangkan melalui tujuh Prioritas Nasional (PN), dimana Badan Pangan Nasional berkontribusi mendukung PN 1, yaitu Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan. Strategi pencapaian sasaran PN ini salah satunya dilakukan melalui Program Prioritas (PP3) Peningkatan Ketersediaan, Akses dan Kualitas Konsumsi Pangan, dengan fokus penguatan tata kelola system pangan dengan penguatan sistem logistik pangan nasional dan transformasi system pangan yang berkelanjutan serta peningkatan kualitas konsumsi pangan.

Dalam pelaksanaannya, pembangunan pangan nasional masih dihadapkan pada tata kelola sistem pangan yang belum berjalan baik sehingga berpotensi mengganggu stabilitas ketersediaan dan harga pangan, masih adanya wilayah rentan rawan pangan, masih rendahnya kualitas konsumsi pangan dan kasus ketidakamanan pangan. Tak hanya itu, Indonesia juga perlu mengantisipasi perubahan iklim, isu pangan di tingkat global mengingat persoalan-persoalan tersebut berdampak pada dinamika dan gejolak harga pangan nasional.

Selanjutnya, khusus menghadapi Hari Besar Keagamaan Nasional (HKBN) Natal 2023 dan Tahun Baru 2024, Pemerintah diharapkan dapat menjaga agar ketersediaan dan stabilitas harga pangan di pasaran dapat terus terjaga. Pemerintah diharapkan terus dapat melakukan pemantauan harga dan ketersediaan pangan di tengah Masyarakat, guna menjaga stabilitas harga dan distribusi pangan di lapangan.

### **3. Kegiatan Penyiapan Bibit Tanaman Hutan serta Pemulihan Ekosistem dan Rehabilitasi Hutan dan Lahan di Wilayah Ibu Kota Nusantara dan sekitarnya**

Persemaian Mentawir dipersiapkan untuk menghijaukan kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN) dan sekitarnya di Pulau Kalimantan. Persemaian ini dibangun untuk mendukung pencapaian target menjaga kelestarian lingkungan dan ekosistem di kawasan IKN, yang merupakan representasi komitmen Pemerintah terhadap lingkungan, dengan melakukan pemulihan lingkungan dan merehabilitasi hutan, terutama hutan alam untuk mengembalikan tropical rain forest yang rusak, serta hutan mangrove yang perlu direhabilitasi. Persemaian Mentawir akan memproduksi kurang lebih 15 juta bibit tanaman per tahun. Bibit yang ditanam juga akan fokus pada tanaman-tanaman endemik Kalimantan dan beberapa pohon yang mulai langka di Kalimantan. Misalnya untuk jenis kayu, didominasi meranti, nyamplung, kapur, dan gaharu.

Saat ini telah terdapat sekitar 3,8 juta bibit dari rencana 15 juta kapasitasnya. Bibit yang telah ada antara lain dari jenis tanaman kayu seperti belangeran, ulin, meranti, balsa, gaharu, nyatoh, nyamplung, tengkawang, jabon dan sebagainya. Kemudian terdapat juga tanaman hasil hutan bukan kayu seperti aren, cempedak, duren, jengkol, petai, mangga, manggis, alpukat, sirsak dan lain-lain, serta tanaman estetika seperti tanjung, flamboyan, tabebuya, dan pucuk merah.

Pembangunan Persemaian Mentawir saat ini sudah hampir mencapai 100%. Hal ini tergambar dengan selesainya pembangunan sarana dan prasarana, seperti jalan lingkungan, embung, serta solar panel untuk tenaga listrik, serta bangunan pendukung lainnya seperti kantor, musholla dan perumahan karyawan, yang keseluruhannya sedang dalam tahap perapihan areal taman, pintu gerbang, dan sebagainya.

Salah satu urgensi pemindahan IKN ialah mengurangi beban kawasan Jabodetabek. Jakarta sebagai IKN, saat ini memiliki tingkat kepadatan penduduk yang sangat tinggi dengan pusat perputaran ekonomi terbesar (80%) sehingga membuat daya dukung lingkungan Jakarta terus menurun.

Hal penting lainnya adalah Kalimantan memiliki risiko bencana alam yang minim serta masih tersedia lahan luas untuk pembangunan.

Namun terdapat kekhawatiran terhadap rencana pemindahan IKN utamanya ancaman ekosistem hutan yang berada disana. Hal ini karena kondisi hutan Kalimantan secara umum terus menunjukkan trend angka deforestasi yang tinggi, Dimana faktor utamanya ialah ekspansi perusahaan perkebunan sawit dan Pembangunan Hutan Tanaman Industri yang dilakukan secara masif selama kurun waktu tahun 1973 sampai dengan 2015. Data deforestasi hingga tahun 2017 masih menunjukkan adanya *loss biodiversity* secara nasional yang Sebagian besar berada di kawasan hutan alam primer. Pengalaman data diatas, menjadi pengingat bagi Pemerintah untuk serius merancang rencana pembangunan IKN dengan memperhatikan keberlangsungan hutan. Karena faktanya, terdapat ancaman keberlangsungan ekosistem hutan di lokasi IKN sehingga penting untuk mempertahankan dan merehabilitasi hutan dengan peran masyarakat di dalamnya.

Sekantunya, di lokasi IKN setidaknya terdapat kawasan konservasi esensial seperti Tahura Bukit Soeharto, Hutan Lindung Sungai Wain (HLSW) serta Cagar Alam Teluk Adang. Data Citra Landsat menunjukkan bahwa 34% kawasan Tahura Bukit Soeharto sendiri masuk berada di lokasi IKN. Terdapat pula HLSW yang berbatasan langsung dengan Kawasan IKN. Bahkan ada sedikit bagian kawasan HLSW yang masuk kedalam kawasan IKN. Kawasan konservasi lainnya ialah CA Teluk Adang yang berada di Kalimantan Timur yang menjadi penyangga bagi ekosistem mangrove meskipun berada diluar kawasan IKN.

Keberadaan kawasan konservasi diatas potensial terancam apabila pembangunan IKN tidak memiliki rencana perlindungan kawasan konservasi. Beberapa penelitian menuliskan bahwa Tahura Bukit Soeharto yang memiliki luas 67,776 ha telah mengalami degradasi fungsi hutan terutama akibat alih fungsi kebun sawit hingga pertambangan batu bara.

Dalam hal ini, Pemerintah memiliki tanggung jawab besar untuk memulihkan kembali fungsi hutan dan mempertahankan seluruh kawasan hutan yang

berada di dalam dan sekitar IKN, dalam rangka memulihkan ekosistem hutan serta keanekaragaman hayati yang berada di dalamnya.

### **C. HASIL KUNJUNGAN KERJA**

#### **1. Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut di Kalimantan Timur serta Penyediaan Ikan dan Produk Perikanan Berkualitas ke Wilayah Ibu Kota Nusantara**

##### **a. Paparan Kementerian Kelautan dan Perikanan terkait Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut di Kalimantan Timur**

- 1) Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut (BPSPL) adalah unit pelaksana teknis di bidang pengelolaan sumber daya pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia.

Saat ini terdapat 8 (delapan) BPSPL di seluruh wilayah Indonesia, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan sedang mengusulkan kepada Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) mengenai pembentukan 5 UPT baru salah satunya BPSL Balikpapan (dengan wilayah kerja di Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Kalimantan Utara).

Penambahan 5 UPT baru ini merupakan tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan, dimana terdapat tambahan tugas dan fungsi dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut, yaitu menjadi pengelolaan ruang laut, pengelolaan lingkungan laut, dan pengelolaan sumber daya kelautan

Dalam pelaksanaannya di lapangan, tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut ditangani oleh BPSL, yaitu sebagai berikut:

- a) melaksanakan kegiatan konservasi laut, baik di pusat maupun di daerah;
- b) melaksanakan pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil;
- c) menangani data kelautan; dan

- d) melaksanakan pengelolaan ruang laut.
- 2) Pelaksanaan Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut di Provinsi Kalimantan Timur:
- a) Penataan Ruang Laut dalam rangka Mendukung Ekonomi Biru di Provinsi Kalimantan Timur



b) Pelaksanaan Kegiatan Konservasi Laut

**KAWASAN KONSERVASI DI KALIMANTAN TIMUR**

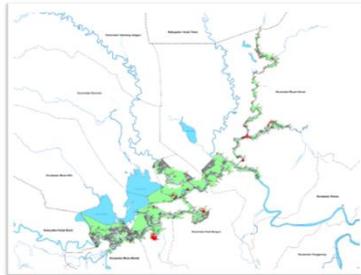
Kawasan Konservasi Kalimantan Timur sesuai Perda Nomor 1 Tahun 2023 Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023-2042 Sebanyak 39 Kawasan dengan total luasan 624.446,922 Ha

Kawasan Konservasi Kalimantan Timur yang sudah ditetapkan :

- KKP3K Kepulauan Derawan dan Perairan Sekitarnya**  
 Status : Penetapan Menteri Kelautan dan Perikanan (Kepmen KP No 69/KEPMEN-KP/2020)
- Kawasan Konservasi di Perairan Bontang**  
 Status : Penetapan Menteri Kelautan dan Perikanan (Kepmen KP No 27 Tahun 2021)
- Kawasan Konservasi Nasional Di Perairan Mahakam Wilayah Hulu (KKMH)**  
 Status : Penetapan Menteri Kelautan dan Perikanan (Kepmen KP No 49 Tahun 2022)



**Kawasan Konservasi Nasional Di Perairan Mahakam Wilayah Hulu (KKMH)** merupakan kawasan konservasi nasional yang terletak di Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. Kawasan Konservasi ini meliputi 4 kecamatan yaitu Kec. Muara Muntai, Kec. Muara Wis, Kec. Kota Bangun, dan Kec. Muara Kaman. Luas keseluruhan KKMH sebesar 42.667,11 Ha dengan target konservasi berupa pesut mahakam (*Orcaella brevirostris*) dan ikan ekonomis penting.



- Status hukum ditetapkan dengan **Kepmen KP No 49 Tahun 2022** tentang Kawasan Konservasi di Perairan Mahakam Wilayah Hulu Kabupaten Kutai Kartanegara.
- **BPSPL Pontianak** sebagai SUOP berdasarkan **Kepdirjen PRL No. 63 Tahun 2022** tentang Tugas Tambahan Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Pontianak
- **Rencana Zonasi** keseluruhan luasan adalah **42.667,99 Ha** terdiri atas:
  - Zona Inti : 1.081,28 Ha
  - Zona Pemanfaatan Terbatas : 30.695,74 Ha
  - Zona Lain : 10.890,97 Ha.



**2023**



### c) Pelaksanaan Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil



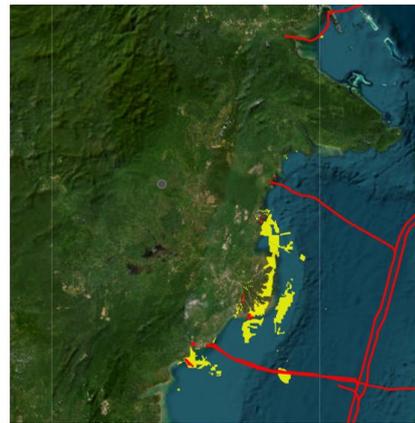
#### Pemanfaatan Ruang Laut di Kalimantan Timur

Hasil Identifikasi Pemanfaat Ruang Laut di Kalimantan Timur estimasi sebanyak 276 pemanfaat ruang laut yang terdiri dari :

- Dermaga
- Pelabuhan
- Pipa/Kabel Bawah Laut
- Terminal Khusus
- Wisata Bahari
- Budidaya Perikanan
- Pemukiman di atas air
- Bangunan Pelindung Pantai
- Coral Stock Center

KKPRL Terbit di Kalimantan Timur dari Tahun 2021-2023 sebanyak 87 KKPRL dan 23 KKPRL dalam proses penerbitan

Jumlah PNBP dari Pelayanan Pemanfaatan Ruang Laut di Kalimantan Timur Tahun 2023 sebesar Rp 71.387.571.400



**2023**



### d) Potensi Pemanfaatan Ruang Laut oleh Masyarakat Lokal



#### Potensi Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut Oleh Masyarakat Lokal di Kalimantan Timur

Hasil Identifikasi Pemanfaatan Ruang Laut Masyarakat Pesisir di Kalimantan Timur terdiri dari :

1. Permukiman di atas air sebanyak 8 lokus terdiri dari :
  - Pulau Maratua sebanyak 2 lokus yaitu Desa Bohe Silian dan Desa Teluk Alulu (Sudah Terbit PKKPR)
  - Bontang sebanyak 5 lokus (3 lokus yaitu Pulau Tihik-Tihik, Tanjung Selangan dan Bontang Kuala Sudah Terbit PKKPR dan 2 lokus yaitu Pulau Gusung dan Pulau Melahing masih dalam proses penerbitan)
  - Kecamatan Batu Putih, Kab. Berau sebanyak 1 Desa belum dilakukan identifikasi



**2023**



## Potensi Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut Oleh Masyarakat Lokal di Kalimantan Timur



Hasil Identifikasi Pemanfaatan Ruang Laut Masyarakat Pesisir di Kalimantan Timur yang dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kaltim bersama BPSPL Pontianak terdiri dari :

2. Alat tangkap pasif sebanyak 862 titik terdiri dari bagan dan belat
  - Perairan Bontang sebanyak 453 titik bagan, 30 titik belat
  - Perairan Samboja sebanyak 50 titik Julu, 48 titik bagan tancap dan 118 titik belat
  - Perairan Kec Marangkayu sebanyak 32 titik Bagan tancap
  - Perairan Kec. Muara Badak sebanyak 74 titik Bagan tancap
  - Kab. PPU sebanyak 57 titik belat
3. Budidaya (rumput laut) sebanyak 48 titik (3 Kelompok) di Perairan Tanjung Harapan, Kec. Samboja

### e) Pembangunan Kawasan Pantai (Coastal Road) Kota Balikpapan

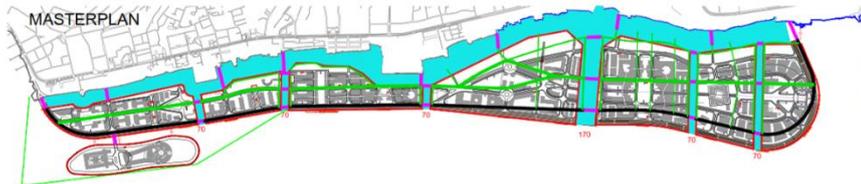
## Pembangunan Kawasan Pantai (Coastal Road) Kota Balikpapan

### LOKASI :

Sepanjang Jl. Jend. Sudirman sepanjang ± 7.8 km (Banua Patra – Stal Kuda) sejauh 200-500 m dari tepi pantai.

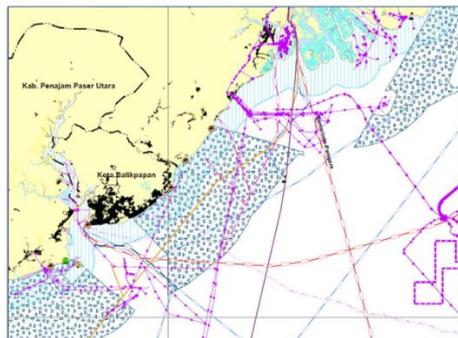
### SASARAN :

1. Menciptakan Pusat Kota Baru/Pusat Perdagangan yang bernuansa pantai di pusat Kota Balikpapan
2. Sebagai alternatif mengatasi kemacetan lalu lintas.
3. Mengembangkan akses publik ke pantai.
4. Penataan Estetika Kota



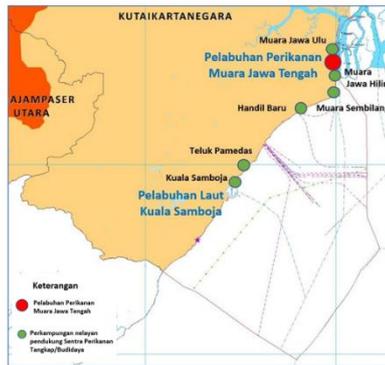
### f) Perencanaan Ruang Laut di Wilayah IKN dan Sekitarnya

## PEMETAAN KEGIATAN EKSTING DI LAUT IKN



- Kegiatan Perikanan:**
- Tambak
  - Rumpon
  - Area penangkapan ikan tradisional (4mil)
  - Kawasan Perikanan
  - Zona perikanan budidaya
  - Zona perikanan tangkap
- Wisata:**
- Pantai
  - Wisata Pulau
  - Wista Mangrove
  - Kawasan Pariwisata
- Alur Pipa dan Kabel:**
- Alur pipa bawah laut
  - Kabel dalam air
- Alur Pelayaran:**
- Jalur pelayaran PT Pelni
  - Alur pelayaran dan perlintasan internasional
  - Alur pelayaran dan perlintasan nasional
  - Alur pelayaran dan perlintasan khusus
  - Jalur Kontainer
  - Pelayaran lokal dan batubara
- Wisata:**
- Panta
  - Wisat
  - Wista
  - Kawar

# RENCANA STRUKTUR RUANG LAUT IKN



- Rencana Struktur Ruang Laut IKN**  
**Susunan Pusat Pertumbuhan KP:**
- ❖ Pelabuhan Perikanan
    - Kel. Muara Jawa Tengah, Kec. Muara Jawa
  - ❖ Sentra Kegiatan Perikanan Tangkap/Budidaya
    - Sentra Perikanan Tangkap/Budidaya di Kel. Muara Jawa Tengah, Kec. Muara Jawa
  - ❖ Perkampungan nelayan pendukung Sentra Perikanan Tangkap/Budidaya
    - Kel. Samboja Kuala
    - Kel. Teluk Pamedas, Kec. Samboja
    - Kel. Handil Baru, Kec. Samboja
    - Kel. Muara Sembilang, Kec. Samboja
    - Kel. Muara Jawa Ulu, kec. Muara Jawa
    - Kel Muara Jawa Pesisir
  - ❖ Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Laut :
    - Jaringan Transportasi laut
    - Pelabuhan Laut
      - Pelabuhan Samboja Kuala (Terintegrasi)
    - Pelabuhan Penyeberangan
      - Pelabuhan penyeberangan Muara Jawa Ulu
  - ❖ Alur pelayaran
    - Alur Pelayaran dan Perlintasan
  - ❖ Sistem Jaringan Sarana Prasarana:
    - Alur Pipa Bawah Laut minyak bumi dan gas

## g) Pelayanan Perizinan Pemanfaatan Jenis Ikan di Kalimantan Timur

### Jenis Pelayanan Perizinan Pemanfaatan Jenis Ikan di Kalimantan Timur

#### Jenis Appendiks



Surat Angkut Jenis Ikan (SAJI)  
[saji.kkp.go.id](http://saji.kkp.go.id)

#### Jenis Non Appendiks



Rekomendasi Jenis Ikan [saji.kkp.go.id](http://saji.kkp.go.id)

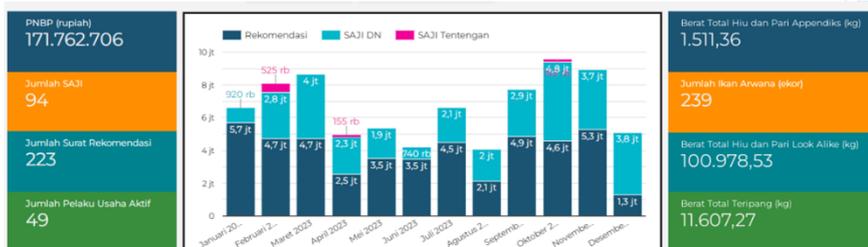


Pendampingan Proposal dan Verifikasi Lapang Permohonan Surat Ijin Pemanfaatan Jenis Ikan (SIPJI)



Verifikasi Lapang Permohonan Surat Angkut Jenis Ikan dan Surat Rekomendasi

### Pelayanan Perizinan Pemanfaatan Jenis Ikan di Kalimantan Timur Tahun 2021-2023



- 3) Dukungan yang diperlukan dari Komisi IV DPR RI adalah:
- Dukungan dalam mengusulkan kepada Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) mengenai pembentukan 5 UPT baru salah satunya BPSL Balikpapan (yang sebelumnya merupakan Wilayah Kerja BPSL Pontianak).

**b. Paparan Kementerian Kelautan dan Perikanan terkait Penyediaan Ikan dan Produk Perikanan Berkualitas ke Wilayah Ibu Kota Nusantara**

1) Gambaran Realisasi Produksi Perikanan

**Profil Ketersediaan dan Kebutuhan Ikan Provinsi Kalimantan Timur 2022**

**Realisasi Produksi Perikanan Tangkap dan Budidaya Provinsi Kalimantan Timur 2022 (ton)**

Komoditas	Produksi (Ton)
Perikanan Tangkap	176.784
Perikanan Budidaya	162.122
<b>Total</b>	<b>338.906</b>

Sumber: Satu Data, KKP

**Angka Konsumsi Ikan Provinsi Kalimantan Timur 2022**

Kebutuhan (ton)	AKI (Kg/Kapita)
255.836	57,07

Sumber: Satu Data, KKP

Memperhatikan capaian produksi dan konsumsi pada tahun 2022, terlihat bahwa produksi perikanan cukup untuk memenuhi kebutuhan konsumsi Masyarakat di Provinsi Kalimantan Timur.

**Volume Produk Olahan Per Jenis Pengolahan di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022**

Jenis Olahan	Volume Produk Olahan (Setara Segar) dalam Ton	Persen
Pengaraman/Pengeringan	68.391,32	58,72%
Fermentasi/Peragian	34,30	0,03%
Pelumatan Daging/Surimi	17.318,86	14,87%
Pembekuan	5.506,88	4,73%
Pemindangan	610,74	0,52%
Penanganan Produk Segar/Dingin	5.969,72	5,13%
Pengasapan/Pemanggangan	1.151,22	0,99%
Pengolahan Lainnya	17.494,39	15,02%
Pereduksian/Ekstraksi	0,03	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>116.477,47</b>	<b>100,00%</b>

Sumber: Ditjen PDSPKP

Produk olahan Provinsi Kalimantan Timur didominasi oleh jenis pengolahan pengaraman/pengeringan, pelumatan daging/surimi dan pengolahan lainnya



**Harga Rata-rata Beberapa Jenis Ikan di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022**

Nama Ikan	Harga Rata-rata Tingkat Konsumen (Rp/Kg)
Udang	90.576
Kembung	39.073
Cumi-Cumi	74.746
Bandeng	37.760

Sumber: Dirjen PDSPKP

2) Dukungan Pemerintah untuk Menjamin Ketersediaan dan Mutu Produk Perikanan

**BANTUAN PEMERINTAH DITJEN PDS UNTUK MENJAMIN KETERSEDIAAN DAN MUTU PRODUK PERIKANAN**

NO	BANTUAN PEMERINTAH	LOKASI	JUMLAH	TAHUN
1	Saran Pengolahan	Kutai Timur, Bontang, Kutai Kartanegara, Penajam Paser Utara	6	2017, 2018, 2022
2	Chest Freezer	Kutai Kartanegara, Penajam Paser Utara, Kutai Timur, Kutai Barat, Bontang, Balikpapan, Samarinda, Berau	27	2018, 2019, 2021, 2022
3	Coolbox	Kota Samarinda	18	2022
4	Gudang Beku Pofrtabel (Kapasitas 20 Ton)	Berau	1	2022
5	Ice Flake Machine	Bontang, Kutai Timur, Bulungan, Berau, Kutai Timur, Samarinda	11	2016, 2017, 2018, 2019
6	Kendaraan Berefrigerasi Roda 4 (4-5 ton)	Penajam Paser Utara	1	2017
7	Kendaraan Berefrigerasi Roda 6 (5-6 ton)	Kutai Timur, Berau	1	2018, 2019
8	Pasar Ikan	Kutai Timur	1	2017
9	Sentra Pengolahan	Samarinda	1	2016
10	Perlengkapan Pedagang Ikan	Kutai Timur	2	2021

3) Strategi Menjaga Stabilitas Pasokan dan Harga Ikan

**STRATEGI MENJAGA STABILITAS PASOKAN DAN HARGA IKAN**



**Pemantauan Pasokan Ikan**

Monitoring produksi perikanan di Pelabuhan Perikanan dan di Sentra Budidaya serta stok ikan di beberapa Cold Storage



**Pemantauan Harga Ikan**

- Koordinasi dengan pemerintah daerah, pelaku usaha, asosiasi dan pelaku usaha
- Pemantauan Harga di Sentra Produksi, Pasar dan Cold Storage serta inflasi ikan (berkoordinasi dengan BPS)



**Mendorong Keterjangkauan Ikan oleh Masyarakat**

- Penggunaan Platform Pemasaran Digital serta Kemitraan antara pembudidaya/ nelayan dengan Supplier dan Pemasar
- Implementasi Sistem Resi Gudang (SRG)
- Pengendalian impor hasil perikanan



**Fasilitasi Sarpras Perikanan**

Sarpras peningkatan produksi ikan, rantai dingin (air blast freezer, gudang beku, pabrik es, mobil berpendingin) serta pengolahan dan pemasaran

### c. Butir Penting Diskusi

- 1) Provinsi Kalimantan Timur berhasil menjadi Juara I Program Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Tingkat Nasional, walaupun terdapat kendala yang dihadapi dalam pengelolaan ruang laut secara optimal, yaitu terbatasnya jumlah sumber daya manusia yang dimiliki oleh Provinsi Kalimantan Timur.
- 2) Belum terlihat secara jelas dukungan Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam pengembangan IKN, dimana belum terjadi adanya kolaborasi antar Kementerian/Lembaga terkait, sehingga bantuan dan program yang diterima dirasakan masih sangat parsial.
- 3) Saat ini terdapat 6 TPI yang sudah dimanfaatkan, namun demikian dalam rangka mendukung IKN kebutuhan ikan tidak cukup hanya disuplai oleh laut Provinsi Kalimantan Timur, akan tetapi perlu mendapat dukungan dari provinsi lainnya. Salah satu masalah utama yang saat ini dihadapi adalah masih terbatasnya sarana ruangan pendingin (*cold storage*) untuk memperpanjang masa penyimpanan ikan dan produk olahan ikan lainnya.
- 4) Dalam upaya untuk mempersiapkan kebutuhan pangan untuk IKN, maka diperlukan:
  - a) pemetaan wilayah produksi, sehingga memberikan kepastian bagi investor untuk melakukan pengembangan usahanya;
  - b) Komisi IV DPR RI melakukan inisiasi untuk pembahasan dukungan anggaran bagi IKN; dan
  - c) Badan Pangan Nasional harus mampu mendesain sistem pangan di IKN sebagai bagian integral dari sistem pangan nasional.
- 5) Dipandang penting untuk membangun tempat pendaratan ikan yang representative di Kabupaten Paser Penajam Utara.
- 6) Perlu adanya dukungan pemenuhan kebutuhan pupuk bersubsidi bagi pembudidaya ikan dalam rangka meningkatkan produksi ikan yang dihasilkannya.

#### **d. Tanggapan Komisi IV DPR RI**

- 1) Komisi IV DPR RI mendukung Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk mengusulkan kepada Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) mengenai pembentukan 5 UPT baru salah satunya BPSL Balikpapan (yang sebelumnya merupakan Wilayah Kerja BPSL Pontianak).
- 2) Peraturan perundang-undangan dalam rangka pelaksanaan pemindahan ibu kota negara dari DKI Jakarta ke Ibu Kota Nusantara masih banyak memerlukan penyempurnaan, diantaranya pengaturan mengenai rencana jangka panjang termasuk implikasi anggaran pelaksanaannya, terutama terkait pemulihan lingkungan, konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya baik di wilayah daratan maupun perairan, serta ketahanan pangan di Wilayah IKN dan sekitarnya. Untuk itu Komisi IV DPR RI membuka kesempatan kepada Kementerian dan Lembaga Mitra Kerja Komisi IV DPR RI untuk memberikan masukan terhadap Rancangan Undang-Undang mengenai Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RUU RPJPN 2025-2045).
- 3) Pembangunan IKN direncanakan untuk memisahkan antara kota bisnis dengan kota pemerintahan, akan tetapi dalam perjalanannya belum terjadi sinkronisasi terkait hal dimaksud dalam pelaksanaan Pembangunan IKN. Bila dibiarkan, maka dikhawatirkan dalam 50 tahun yang akan datang kota ini akan bernasib sama seperti Jakarta.
- 4) Dalam mendukung Pembangunan IKN, tidak diperlukan pembangunan kawasan produksi pangan baru, akan tetapi harus dilakukan pengaturan sistem logistik dan distribusi produk pangan yang berasal dari daerah penyangga IKN, di kabupaten/kota di sekitar IKN, baik yang berada di dalam maupun di luar wilayah Kalimantan Timur.
- 5) Sampai saat ini, kebutuhan pangan di Kalimantan Timur masih tergantung pada daerah lainnya. Namun kenyataannya, daerah surplus pangan yang merupakan pemasok kebutuhan pangan bagi Kalimantan Timur, masih memiliki angka kemiskinannya yang sangat

tinggi. Dengan kondisi demikian, dapat diartikan bahwa terdapat kesalahan kebijakan dalam pengembangan sistem produksi pangan Indoensia.

- 6) Komisi IV DPR RI mendorong dilakukannya koordinasi, sinkronisasi dan kolaborasi antara Kementerian/Lembaga terkait dalam melaksanakan Pembangunan IKN, yang sudah menjadi keputusan nasional dan menjadi sebuah kebutuhan yang harus dilakukan secara konsisten.
- 7) Komisi IV DPR RI mendorong dilakukannya pemetaan pangan di wilayah IKN dan sekitarnya dengan melakukan klusterisasi ketahanan pangan di masing-masing wilayah.

## 2. Kesiapan Pangan Jelang Hari Natal 2023 dan Tahun Baru 2024

### a. Paparan Perum BULOG

#### 1) Realisasi Pengadaan Gabah/Beras Dalam Negeri Tahun 2023



(Ton setara beras)

Bulan	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Januari	2.009	6.935	13.260	8.374	6.921
Februari	6.365	39.359	19.850	6.992	6.774
Maret	64.447	43.876	201.526	48.702	80.605
April	248.311	85.978	338.253	201.222	202.000
Mei	305.516	251.072	134.729	138.684	268.417
Juni	121.717	269.078	31.515	146.835	127.854
Juli	129.882	168.927	79.769	73.771	69.875
Agustus	86.654	63.874	107.692	33.018	41.339
September	83.676	32.927	107.114	55.955	45.877
Oktober	64.020	125.579	98.256	94.817	46.311
November	55.517	143.782	29.881	137.658	65.880
Desember	33.149	25.121	54.465	48.623	37.148
Jumlah	1.201.264	1.256.507	1.216.311	994.651	999.001
Semester I	748.365	696.297	739.133	550.809	692.571
Semester II	452.899	560.210	477.178	443.842	306.430

\*Data per 8 Desember 2023

#### Realisasi Pengadaan Gabah/Beras DN Tahun 2023

No	Gabah	Kualitas (%)		
		Kadar Air	Kadar Hampa	HPP (Rp/Kg)
1	GKP di Petani	Maks 25	Maks 10	5.000
2	GKP di Penggilingan	Maks 25	Maks 10	5.100
3	GKG di Penggilingan	Maks 14	Maks 3	6.200
4	GKG di Gudang BULOG	Maks 14	Maks 3	6.300

Derajat Sosoh (Min)	Kualitas Beras di Gudang BULOG (%)			
	Kadar Air (Maks)	Butir Patah (Maks)	Butir Menir (Maks)	HPP (Rp/Kg)
95	14	20	2	9.950

Total Pengadaan DN : 999.001 Ton, terdiri dari

- CBP : 606.340 Ton
- Komersial : 392.661 Ton

#### 2) Ketersediaan dan Stok Beras



#### Ketersediaan dan Stok Beras

Total : 1.473.243 Ton

- CBP di gudang : 785.299 Ton
- CBP dalam perjalanan : 594.180 Ton
- Komersial : 93.764 Ton



### 3) Stok Komoditas Pangan Lain



#### Stok Komoditas Pangan Lain

Tepung Terigu	123 Ton	Gula Pasir	5.544 Ton
Minyak Goreng	4.318 Kilo Liter	Telur	89 Ton
Daging Sapi	42 Ton	Daging Kerbau	777 Ton

\*Data per 8 Desember 2023



AKHLAK - Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif

### 4) Realisasi Penjualan Minyak Goreng Simirah Tahun 2023



#### Realisasi Penjualan Minyak Goreng Simirah Tahun 2023



AKHLAK - Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif

MGCR Simirah 2	
Kanwil	Jumlah (Kilo Liter)
Aceh	715
Sumut	463,16
Riau	2.415
Sumbang	214,16
Jambi	382
Sumsel & Babel	2.088,92
Bengkulu	1.238
Lampung	9.034,41
DKI Jakarta & Banten	2.049
Jawa Barat	1.051,77
Jawa Tengah	10.406
Yogyakarta	2.691,93
Jawa Timur	4.029
Kalbar	308,29
Kaltim & Kaltara	1.144
Kalsel	463,56
Kalteng	705
Sulut & Gorontalo	2.188,29
Sulteng	31.055
Sultra	4.755,59
Sulsel & Sulbar	12.521
Bali	515,74
NTB	228
NTT	1.091,21
Maluku & Maluku	1.574
Papua & Pabar	4.629,25
<b>Total</b>	<b>97.978,15</b>

### 5) Penerimaan Impor Beras Tahun 2023



#### Rincian Rekap Penerimaan Impor Beras Tahun 2023

**Sebanyak 3,8 Juta Ton**

Penerimaan	Surat Bapangan		Persetujuan Impor		Kuantum (Ton)	Kontrak (Ton)	Real. BL (Ton)
	Nomor	Tanggal	Nomor	Tanggal			
I	223/PANGAN/K/12/2022	09/12/2022	04-PI-11.22.0605	19/12/2022	300.000	300.000	294.824
II	82/TU.03.03/K/3/2023	24/03/2023	04-PI-11.22.0605.3	31/03/2023	2.000.000	2.006.600	1.854.983
III	281/TS.03.03/K/9/2023	29/09/2023	04-PI-11.22.0605.6	05/10/2023	1.500.000	1.005.000	168.148
<b>Jumlah</b>					<b>3.800.000</b>	<b>3.311.600</b>	<b>2.317.955</b>

No	Proses Penerimaan	PI 300K			PI 2 JUTA						PI 1,5 JUTA		TOTAL
		Tahap I	Tahap II	Tahap III	Tahap IV	Tahap V	Tahap VI	Tahap VII	Tahap VIII	Tahap IX	Tahap X		
1	Tgl. Lelang	21/12/2022	30/03/2023	30/05/2023	05/07/2023	24/07/2023	03/08/2023	18/08/2023	07/09/2023	16/09/2023	05/10/2023	20/10/2023	
2	Kontrak	300.000	500.000	300.000	270.000	99.500	77.500	300.000	300.000	159.600	500.000	505.000	3.311.600
3	Seleksi Bongkar	294.824	502.798	298.373	260.943	99.500	12.500	219.713	98.860	57.135	6.900	-	1.851.545
4	Sedang Bongkar	-	-	-	-	-	-	41.450	113.840	3.950	46.098	-	205.338
5	Dalam Perjalanan	-	-	-	-	-	13.000	23.678	82.994	26.250	57.450	57.700	261.072
6	Sedang Muat	-	-	-	-	-	-	10.000	-	19.000	34.000	33.100	96.100
7	Packing	-	-	-	-	-	22.000	-	-	15.350	29.600	-	66.950
8	Jumlah 3 s.d. 7	294.824	502.798	298.373	260.943	99.500	47.500	294.842	295.694	121.685	174.048	90.800	2.481.005

\*Data per 8 Desember 2023

AKHLAK - Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif

- 6) Secara keseluruhan kondisi pangan nasional dalam menghadapi natal dan tahun baru adalah dalam kondisi aman.

**b. Butir Penting Diskusi**

- 1) Secara keseluruhan kondisi pangan nasional dalam menghadapi natal dan tahun baru adalah dalam kondisi aman meskipun ada beberapa komoditas pertanian yang harganya dalam posisi tinggi dan stabil tinggi.
- 2) Badan Pangan Nasional dan Perum BULOG diharapkan tidak terjebak dalam pelaksanaan tugas terkait permasalahan pangan yang sifatnya situasional seperti menghadapi kebutuhan dan kenaikan harga bahan pangan pokok yang selalu mengalami kenaikan pada saat menghadapi libur nasional dan libur perayaan hari keagamaan. Sudah sangat sewajarnya jika Badan Pangan Nasional menyediakan pangan sepanjang tahun dengan jumlah dan harga yang dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat.
- 3) Komisi IV DPR RI sangat menyayangkan adanya kebijakan impor beras terutama untuk beras khusus. Kondisi ini seharusnya tidak terjadi karena sarat dengan manipulasi dan menunjukkan tidak adanya keberpihakan terhadap produksi nasional. Untuk itu Badan Pangan Nasional diharapkan dapat mengoreksi kebijakan impor beras yang dilakukan oleh Pemerintah saat ini.
- 4) Badan Pangan Nasional harus melakukan upaya untuk mengembalikan kebiasaan masyarakat untuk mengkonsumsi makanan pokok yang berbasis pangan lokal di daerahnya masing masing.
- 5) Upaya peningkatan produksi pangan nasional dengan melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi belum mampu menyelesaikan permasalahan utama produksi pangan nasional. Hal ini terlihat pada saat produksi di dalam negeri melimpah, pemerintah belum mampu menjamin penyerapan produk pangan dengan harga yang menguntungkan petani dengan tetap tidak mengurangi akses konsumen untuk mendapatkannya. Dalam hal ini Komisi IV DPR RI

mendorong agar Badan Pangan Nasional dan Perum BULOG dapat tetap mempertahankan harga produksi pangan di tingkat petani agar tetap memberikan keuntungan yang memadai bagi petaninya.

- 6) Saat ini petani yang menanam jenis padi Varietas Kebo, produknya tidak dibeli oleh Perum BULOG, dengan alasan kualitas berasnya yang tidak memenuhi standar kualitas yang telah ditentukan. Salah satu penyebabnya adalah warna dari beras yang kurang menarik, padahal jenis tanaman padi tersebut termasuk dalam jenis padi yang tahan banjir dan rendaman. Meskipun kemudian petani berupaya melakukan inovasi dengan menyilangkan Varietas Kebo dengan Varietas Ciherang, akan tetapi Perum BULOG tetap belum bersedia membeli produk beras petani dimaksud.
- 7) Swasembada pangan sulit untuk dicapai, mengingat konversi lahan pertanian yang subur menjadi lahan non pertanian setiap tahunnya bisa mencapai 200 ribu hektar.
- 8) Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian menilai Pemerintah harus melakukan perbaikan tata kelola industri perungasan, sehingga peternak kecil perungasan tidak selalu merugi. Saat ini terdapat surplus produksi ayam dan telur sebanyak 300.000 ton. Disarankan agar Pemerintah memiliki cadangan produksi ayam dan telur.
- 9) Komisi IV DPR RI mendorong Pemerintah untuk menyusun *grand strategi* tentang ketahanan pangan, yang dibuat berdasarkan data produktivitas dan daerah produksi pangan nasional yang akurat.
- 10) Komisi IV DPR RI mendorong Badan Pangan Nasional unruk menjadi lembaga pangan yang kuat dan menguasai cadangan pangan yang tersedia secara cukup dan dapat diakses oleh seluruh masyarakat. Selanjutnya Badan Pangan Nasional diharapkan mampu mengembangkan pangan lokal, sehingga kebijakan untuk mengimpor beras segera dapat dikoreksi.
- 11) Terkait dengan kondisi komoditas jagung, pada saat ini para pemodal bukan hanya menguasai pasarnya akan tetapi juga menguasai sektor

produksinya, sehingga harga jagung sanbat ditentukan oleh para pemilik modal.

### 3. Kegiatan Penyiapan Bibit Tanaman Hutan serta Pemulihan Ekosistem dan Rehabilitasi Hutan dan Lahan di Wilayah Ibu Kota Nusantara dan sekitarnya

#### a. Paparan Direktur Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan

##### 1) Pembangunan Pusat Persemaian Mentawir

Bertujuan mewujudkan Ibu Kota Nusantara sebagai Forest City, mengembalikan hutan monokultur menjadi tropical rain forest, serta mendukung rehabilitasi hutan dan lahan di Kalimantan Timur.

#### PEMBANGUNAN PUSAT PERSEMAIAN MENTAWIR

Tujuan : Persemaian Mentawir dibangun dalam rangka mewujudkan Ibu Kota Nusantara (IKN) sebagai Forest City, mengembalikan hutan monokultur menjadi tropical rain forest, serta mendukung rehabilitasi hutan dan lahan (RHL) di Kalimantan Timur

Pembangunan Pusat Persemaian Mentawir merupakan kolaborasi antara :



1. Pembangunan Sarana Utama Persemaian, terdiri dari:
  - a. Production House Area
  - b. Motherplant House Area
  - c. Germination House Area
  - d. Acclimatization House Area
  - e. Shading Growth Area
  - f. Pump House
2. Pembangunan Sarana Pendukung Persemaian, terdiri dari:
  - a. Kantor
  - b. Mess
  - c. Mushola



- Pembangunan Sarana penyediaan air baku (water supply system), terdiri dari:
1. Water Intake
  2. Embung
  3. Water Tank
  4. Ultrafiltration House
  5. Water Spillway
  6. Solar Panel



- Preservasi Jalan Persemaian yang meliputi:
1. Penataan Kawasan Gerbang masuk dari jalan utama Sambaaja-Sepaku
  2. Jalan Inhutani-Hauling sejauh ± 6 km
  3. Jalan Hauling-Simpang masuk ke Persemaian ± 5 km
  4. Jalan dari simpang hauling menuju persemaian ± 0,4 km
  5. Jalan Kolektor Persemaian ± 1 km
  6. Jalan dari gerbang utama persemaian menuju embung ± 0,9 km



- Pembangunan Sarana Pendukung Persemaian, terdiri dari:
1. Dinding Penahan Tanah
  2. Bronjong
  3. Gazebo
  4. Power House
  5. Penataan Landscape

##### 2) Siteplan Pusat Persemaian Mentawir



Lokasi :  
Hutan Produksi Desa Mentawir,  
Kec. Sepaku - Kab. PPU  
Luas :  
- Sarana utama : 16,6 Ha  
- Embung : 7,28 Ha

#### SITEPLAN PUSAT PERSEMAIAN MENTAWIR

1. Terdiri dari:
  - a. Production House Area (PHA)
  - b. Storage Room
  - c. Pump House
  - d. Office
  - e. Mushola
2. Motherplant House Area (MPH)
3. Germination House Area (GHA)
4. Acclimatization House Area (AHA)
5. Shading Growth Area (SGA)
6. Water Intake
7. Terdiri dari:
  - a. Mess
  - b. Water Tank
  - c. Ultrafiltration House
  - d. Solar Panel
8. Embung dan Water Spillway

### 3) Sarana dan Prasarana Pusat Persemaian Mentawir

#### Sarana Utama Persemaian



#### Penyediaan Air Baku Dan Pendukung Persemaian



### 4) Realiasi Produksi Bbit

**PRODUKSI BIBIT TAHUN 2023**

**TARGET :**  
4.000.000 btg

➔

**REALISASI :**  
3.840.935 btg

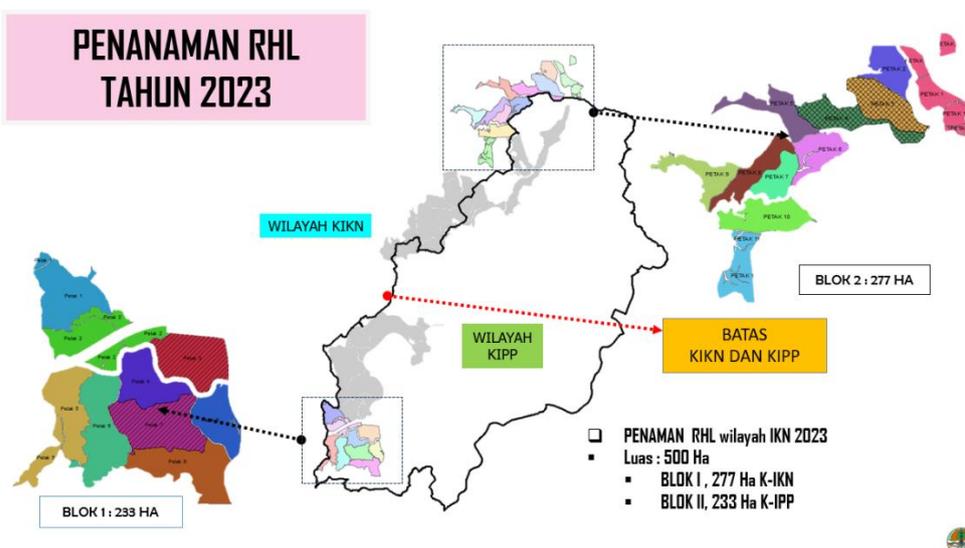
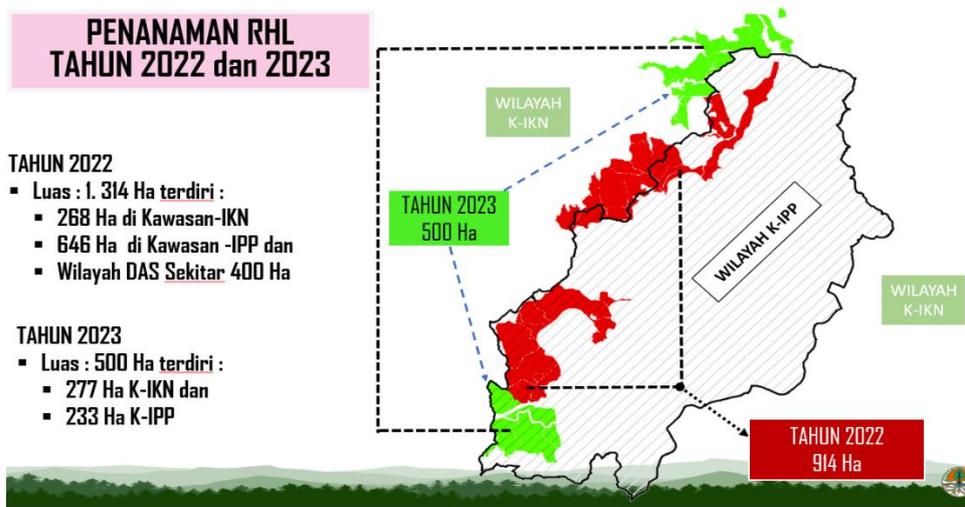
KAYU-KAYUAN :		MPTS	TANAMAN ESTETIKA
1. Kapur	6. Nyatoh	1. Alpokak	6. Jengkol
2. Meranti	7. Salam	2. Aren	7. Rambai
3. Medang	8. Sungkai	3. Cempedak	8. Rambutan
4. Nyatoh	9. Baharu	4. Durian	9. Sirsak
5. Pulai	10. Balsa	5. Jambu-jambuan	10. Nangka







## 5) Realiasi Kegiatan Penanaman Rehabilitasi Hutan dan Lahan



### b. Tanggapan Komisi IV DPR RI

- 1) Komisi IV DPR RI memberikan apresiasi kepada Pemerintah c.q. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atas pembangunan Pusat Persemaian Mentawir yang merupakan kolaborasi antara beberapa Kementerian/Lembaga serta pihak swasta yang memiliki komitmen dalam mewujudkan Ibu Kota Nusantara sebagai *Forest City*, mengembalikan hutan monokultur menjadi *tropical rain forest*, serta mendukung rehabilitasi hutan dan lahan di Kalimantan Timur.
- 2) Komisi IV DPR RI mendorong Pemerintah c.q. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk juga melaksanakan pembangunan pusat persemaian di seluruh setiap provinsi sebagai

wujud komitmen negara untuk melaksanakan pencapaian target pemulihan ekosistem di seluruh wilayah Indonesia, dengan melakukan rehabilitasi hutan, terutama hutan alam untuk mengembalikan tropical rain forest yang rusak serta hutan mangrove yang perlu direhabilitasi, dengan melibatkan masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan.

- 3) Peraturan perundang-undangan dalam rangka pelaksanaan pemindahan ibu kota negara dari DKI Jakarta ke Ibu Kota Nusantara masih banyak memerlukan penyempurnaan, diantaranya pengaturan mengenai rencana jangka panjang termasuk implikasi anggaran pelaksanaannya, terutama terkait pemulihan lingkungan, konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya baik di wilayah daratan maupun perairan, serta ketahanan pangan di Wilayah IKN dan sekitarnya. Untuk itu Komisi IV DPR RI membuka kesempatan kepada Kementerian dan Lembaga Mitra Kerja Komisi IV DPR RI untuk memberikan masukan terhadap Rancangan Undang-Undang mengenai Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RUU RPJPN 2025-2045).

#### **IV. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI**

- A. Komisi IV DPR RI mendukung Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk mengusulkan kepada Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) mengenai pembentukan 5 UPT baru salah satunya BPSL Balikpapan (yang sebelumnya merupakan Wilayah Kerja BPSL Pontianak).
- B. Komisi IV DPR RI membuka kesempatan kepada Kementerian dan Lembaga Mitra Kerja Komisi IV DPR RI c.q. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pertanian, serta Badan Pangan Nasional untuk memberikan masukan terhadap Rancangan Undang-Undang mengenai Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RUU RPJPN 2025-2045), terutama terkait pengatiran mengenai pemulihan lingkungan, konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya baik di

wilayah daratan maupun perairan, serta ketahanan pangan di Wilayah IKN dan sekitarnya.

- C. Komisi IV DPR RI mendorong dilakukannya koordinasi, sinkronisasi dan kolaborasi antara Kementerian/Lembaga terkait serta antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (baik provinsi maupun kabupaten/kota) dalam melaksanakan Pembangunan IKN, yang sudah menjadi keputusan nasional dan menjadi sebuah kebutuhan yang harus dilakukan secara konsisten.
- D. Komisi IV DPR RI mendorong Pemerintah untuk melakukan pengaturan sistem logistik dan distribusi produk pangan yang berasal dari daerah penyangga IKN, di kabupaten/kota di sekitar IKN, baik yang berada di dalam maupun di luar wilayah Kalimantan Timur, dalam rangka memenuhi kebutuhan pangan di wilayah IKN dan sekitarnya.
- E. Komisi IV DPR RI mendorong Badan Pangan Nasional untuk menjadi lembaga pangan yang kuat dan menguasai cadangan pangan yang tersedia secara cukup dan dapat diakses oleh seluruh masyarakat. Selanjutnya Komisi IV DPR RI Mendorong Badan Pangan Nasional agar mampu mengembangkan pangan lokal, sehingga kebijakan untuk mengimpor beras segera dapat dikoreksi.
- F. Komisi IV DPR RI mendorong Badan Pangan Nasional untuk melakukan upaya dalam rangka mengembalikan kebiasaan masyarakat untuk mengkonsumsi makanan pokok yang berbasis pangan lokal di daerahnya masing masing.
- G. Komisi IV DPR RI mendorong agar Badan Pangan Nasional dan Perum BULOG dapat tetap mempertahankan harga produksi pangan di tingkat petani agar tetap memberikan keuntungan yang memadai bagi petaninya, dengan terus meningkatkan kemampuan penyerapan produk pangan lokal petani dengan harga yang menguntungkan petani serta menjamin akses bagi konsumen untuk mendapatkan produk pangan, termasuk dan terutama pada saat produksi di dalam negeri melimpah.
- H. Komisi IV DPR RI mendorong Pemerintah untuk menyusun *grand strategi* tentang ketahanan pangan akan dijadikan sebagai acuan bagi seluruh pemangku kepentingan, yang dibuat berdasarkan data produktivitas dan daerah produksi pangan nasional yang akurat.

- I. Komisi IV DPR RI memberikan apresiasi kepada Pemerintah c.q. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atas pembangunan Pusat Persemaian Mentawir yang merupakan kolaborasi antara beberapa Kementerian/Lembaga serta pihak swasta yang memiliki komitmen dalam mewujudkan Ibu Kota Nusantara sebagai Forest City, mengembalikan hutan monokultur menjadi tropical rain forest, serta mendukung rehabilitasi hutan dan lahan di Kalimantan Timur.
- J. Komisi IV DPR RI mendorong Pemerintah c.q. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk juga melaksanakan pembangunan pusat persemaian di seluruh setiap provinsi sebagai wujud komitmen negara untuk melaksanakan pencapaian target pemulihan ekosistem di seluruh wilayah Indonesia, dengan melakukan rehabilitasi hutan, terutama hutan alam untuk mengembalikan tropical rain forest yang rusak serta hutan mangrove yang perlu direhabilitasi, dengan melibatkan masyarakat di dalam dan disekitar kawasan hutan.

## V. PENUTUP

Demikian Laporan Kunjungan Kerja Reses Komisi IV DPR RI Masa Persidangan II Tahun Sidang 2023-2024 ke Provinsi Kalimantan Timur. Selanjutnya Komisi IV DPR RI akan menindaklanjuti aspirasi serta rekomendasi dalam Rapat Kerja maupun Rapat Dengar Pendapat bersama Mitra Kerja Komisi IV DPR RI. Semoga kunjungan kerja ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

Jakarta, Desember 2023

Ketua Tim/  
Anggota Komisi IV DPR RI

Ttd.

Firman Soebagyo, S.E., M.H  
A-303

## LAMPIRAN DOKUMENTASI



**Diskusi di Kantor BPSPL Pontianak Satuan Kerja Balikpapan**



**Kunjungan dan Diskusi di Kantor Perum BULOG Divre Klandasan Ilir, Balikpapan**



**Kunjungan dan Diskusi di Pusat Persemaian Mentawir, Kecamatan Sepaku,  
Paser Penajam Utara**

## LAMPIRAN MEDIA YANG MELIPUT

<https://kkp.go.id/djprl/galeri/18800-kunjungan-kerja-reses-pimpinan-dan-anggota-komisi-iv-dpr-ri-ke-kantor-wilker-bpspl-pontianak-di-balikpapan-12-12>

<https://kkp.go.id/djprl/galeri/18800-kunjungan-kerja-reses-pimpinan-dan-anggota-komisi-iv-dpr-ri-ke-kantor-wilker-bpspl-pontianak-di-balikpapan-12-12>

<https://mediaindonesia.com/nusantara/637649/kunjungan-ke-kaltim-komisi-iv-bahas-kesiapan-pangan-bagi-ikn>

<https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/48124/t/Jangan+Hanya+Impor%2C+Ono+Surono+Dorong+Bulog+Tingkatkan+Diversifikasi+Serapan+Varietas+Beras+Lokal>

<https://badanpangan.go.id/blog/post/nfa-bersama-komisi-iv-dpr-ri-tinjau-gudang-bulog-kota-balikpapan-pastikan-kesiapan-pangan-jelang-nataru-di-kalimantan-timur-dan-kalimantan-utara>

<https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/48116/t/javascript:>

<https://www.youtube.com/watch?v=imOU6iDz4qk>

<https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/48123/t/Pasok+Bibit+Tanaman+untuk+IKN%2C+Komisi+IV+Apresiasi+Kondisi+Persemaian+Mentawir>

<https://www.instagram.com/bpdasmahakamberau/>

<https://www.youtube.com/watch?v=imOU6iDz4qk>

## LAMPIRAN MITRA PENDAMPING

INSTANSI	JABATAN/NAMA
<b>KEMENTERIAN PERTANIAN</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan <b>Dr. Ir. NASRULLAH, M.Sc.</b></li> <li>2. Direktur Serelia, Ditjen Tanaman Pangan <b>Dr. Ir. MOH. ISMAIL WAHAB, M.Si</b></li> <li>3. Direktur Irigasi Pertanian, Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian <b>Ir. RAHMANTO, M.Sc</b></li> <li>4. Kepala Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Medan, Ditjen Perkebunan <b>Ir. PARLIN ROBERT SITANGGANG</b></li> <li>5. Kepala Balai Standarisasi Instrumen Pertanian Kalimantan Timur <b>ZAINAL ABIDIN, S.P., M.P</b></li> </ol>
<b>KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Direktur Jenderal Pengelolaan DAS dan Rehabilitasi Hutan <b>Ir. DYAH MURTININGSIH, M.Hum</b></li> <li>2. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan <b>Dr. Ir. HANIF FAISOL NURROFIQ, S.Hut., M.P.</b></li> <li>3. Direktur Bina Pengelolaan dan Pemulihan Ekosistem, Ditjen KSDAE <b>Dr. Ir. Ammy Nurwati, M.M.</b></li> <li>4. Direktur Perbenihan Tanaman Hutan, Ditjen PDASRH <b>NURUL IFTITAH, S.Hut., M.Si.</b></li> <li>5. Kepala Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Kalimanta <b>Dr. MINI FARIDA, ST., M.Si.</b></li> <li>6. Kepala Balai Pengelolaan DAS Mahakam Berau <b>RINTAN NILAYWATI, S.Hut.</b></li> <li>7. Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah IV <b>HENGKY WIJAYA, S.Hut.</b></li> <li>8. Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Timur <b>MATHEAS ARI WIBAWANTO, S.Hut., M.Sc.</b></li> </ol>
<b>KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sekretaris Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut <b>Dr. KUSDIANTORO, S.Pi., M.Sc</b></li> <li>2. Direktur Usaha dan Investasi, Ditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan Dan Perikanan <b>Dr. CATUR SARWANTO, S.PT., M.Si.</b></li> <li>3. Kepala Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Pontianak <b>SYARIF IWAN TARUNA ALKADRIE, S.T., M.Si;</b></li> </ol>
<b>BADAN RESTORASI GAMBUT DAN MANGROVE</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala Badan Restorasi Gambut Dan Mangrove Ri <b>Ir. HARTONO, M.Sc</b></li> <li>2. Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat <b>Ir. GATOT SOEBIANTORO, M.Sc</b></li> </ol>

INSTANSI	JABATAN/NAMA
<b>BADAN PANGAN NASIONAL</b>	✓ Deputi Penganeekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan <b>Dr. ANDRIKO NOTO SUSANTO, SP, MP</b>
<b>PERUM BULOG</b>	1. Direktur Keuangan Perum BULOG <b>BAGYA MULYANTO</b> 2. Pimpinan Wilayah Perum BULOG Kaimantan Timur <b>AMRULLAH</b>
<b>RAJAWALI NUSANTARA INDONESIA/ID FOOD/HOLDING PANGAN</b>	✓ Direktur Supply Chain Management & TI PTRNI (Persero)/ID FOOD <b>BERNADETTA RARAS INDAH ROSARI</b>
<b>PUPUK INDONESIA HOLDING COMPANY</b>	3. Director Of Risk Management PIHC <b>NINIS KESUMA ADRIANI</b> 4. Direktur Keuangan dan Umum PT Pupuk Kaltim <b>QOMARUZZAMAN</b>